

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA
MELALUI CPOPC DALAM MENDORONG KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Ilmu Hubungan Internasional

SIANA

4519023039

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Kerjasama Indonesia – Malaysia Melalui CPOPC Dalam Mendorong Kelapa Sawit Berkelanjutan

Nama Mahasiswa : Siana

Nomor Stambuk : 4519023039

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 23 Februari 2023

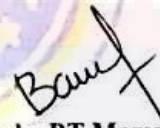
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Rosnani, S.IP., M.A
NIDN. 0930018001

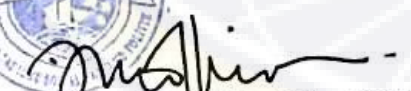
Pembimbing II



Beche BT Mamma, S.IP., M.A
NIDN. 0906128203

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.IP., M.A
NIDN. 0908088306

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Implementasi Kerjasama Indonesia – Malaysia Melalui CPOPC Dalam Mendorong Kelapa Sawit Berkelanjutan**

Nama : Siana
Nomor Stambuk : 4519023039
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

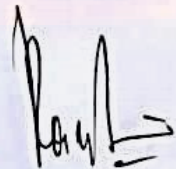
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

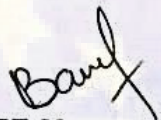
Makassar, 23 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si


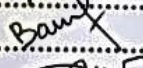
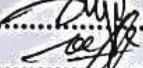
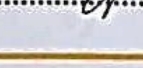
Panitia Ujian :


Dr. Rosnani, S.IP., M.A
Ketua


Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Rosnani, S.IP., MA
2. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
3. Ayu kartika J. T., S.IP., MA
4. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Siana
Tempat, tanggal lahir : Nunukan, 19 Desember 2001
NIM : 4519023039
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KERJASAMA
INDONESIA-MALAYSIA MELALUI CPOPC DALAM MEWUJUDKAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (Peneliti Sebelumnya. Maupun Jurnal Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah

Apabila Karya Ilmiah atau Penulisan Skripsi ini terbukti di duplika ataupun di plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan, karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima Sanksi Akademik berupa Pencabutan Gelar dan Sanksi Hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada tekanan dan juga paksaan dari pihak manapun

Makassar, 17 Maret 2023



Siana
Nim : 4519023039

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, dengan segala kemudahan informasi serta perkembangan teknologi. Tentunya mendorong negara untuk membangun hubungan bilateral dengan negara lain demi memenuhi tujuan nasional mereka. Dengan melihat potensi pada kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia serta permasalahan sawit yang ada. Indonesia dan Malaysia kemudian memprakarsai Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui arsip – arsip buku, jurnal tentang yang berisi pendapat atau teori yang berkaitan dengan pembahasan. Penulis menggunakan konsep Kerjasama Internasional.

Adapun beberapa upaya kerjasama Indonesia-Malaysia melalui CPOPC dalam mendorong kelapa sawit berkelanjutan yaitu, melalui upaya diplomatik, melakukan diseminasi informasi publik dengan menerbitkan artiker, dan berupaya mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan dengan membuat Kebijakan Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil (E+POP), meningkatkan implementasi Good Agricultural Practices (GAP), dan mengadakan Business and Smallholders Forum

Kata Kunci: CPOPC, Kerjasama Internasional, kelapa sawit berkelanjutan, ISPO, MSPO, RSPO.

ABSTRACT

In the current era of globalization, with all the convenience of information and technological developments, certainly encourage countries to build bilateral relations with other countries in order to fulfill their national goals. By looking at the potential of palm oil in Indonesia and Malaysia as well as the existing palm oil problems. Indonesia and Malaysia then initiated the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). The research method used in this study is a qualitative method. The data collection technique is to collect data through literature study, namely by collecting data through archives of books, journals about which contain opinions or theories related to the discussion. The author uses the concept of International Cooperation.

As for some of the Indonesia-Malaysia collaboration efforts through CPOPC in encouraging sustainable palm oil, namely, through reducing efforts, disseminating public information by publishing articles, and trying to promote sustainable palm oil by making a Proposed Policy on the Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil (E+POP)), increasing the implementation of Good Agricultural Practices (GAP), and holding a Business and Smallholders Forum.

Keywords: CPOPC, Collaboration, Sustainable Palm Oil, ISPO, MSPO, RSPO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berperan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan saya, yaitu.

1. Kedua Orangtua, Herah, Lilis, Annas, tante dewi, dan semua keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama perkuliahan. Saya sangat bersyukur bisa didukung dalam bentuk materi maupun moril, serta diberikan berbagai fasilitas guna mendukung berbagai aktivitas perkuliahan. Kalian sangat berarti dihidupku, dan bisa sampai ditahap ini karena berkat dan doa dari kalian. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu.
2. Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A dan Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A kedua saya. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sangat

beruntung bisa mendapatkan dua dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulisan skripsi saya.

3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa. Kepada Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A, Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A, Ibu Ayu Kartika J.T., S.Ip., M.A dan Bapak Muh. Fahmi B. Fauzi, S.Ip., M.Sc, yang telah berkenan mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan selama saya berkuliah di Universitas Bosowa. Saya berdoa semoga bapak ibu dosen diberikan kesehatan selalu dan sukses dalam karir kalian.
4. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Budi Setiawan, S.Pt dan Ibu Deviacita D.S, S.Farm yang telah membantu saya dan teman-teman 3.5 tahun dalam berbagai urusan administrasi dan dokumen, serta permintaan maaf kami jika selalu merepotkan kalian. Semoga kalian selalu semangat dalam mengerjakan tugas kalian dan sukses dalam karir.
5. Kepada Melly Oktavia, Nafa Nabila Mufin, Grace Mase' Handana, Junita Seprianto, Sarmina, Annisa Dwi Wulandari, Mutia Astar S.IP yang sudah menemani saya dari awal perkuliahan sampai akhir kelulusan. Semoga kalian lancar dalam mengerjakan Skripsi dan lulus tepat waktu. Sangat bersyukur bertemu sahabat yang bisa selalu menjadi tempat pulang. Terimakasih bantuan, dukungan dan doanya gais. Semoga kita bisa bersahabat selamanya, dimanapun kita berada nanti.

6. Kepada Andi Rochpikaramadhan A R, S.IP., Ng Tzun Vui, Adelia juliarti Ali Rufey S.IP., Sri Rezki Amaliah, Muammar, dan Keluarga Bencana.

Terimakasih telah menjadi teman yang selalu peduli dan membantu selama perkuliahan. Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian nantinya.

7. Kepada Sahabat, Indah Gita Cahyani Zulkarnain. saudari yang selalu ada dan mendukung dari saat smk sampai diproses ini .
8. Kepada teman-teman KKN saya di desa Moncongloe Bulu, terutama Adinda Puja Lestari Putri Ahmad S.IP, Nirma Amir, dan Latifah. Yang telah menemani saya dalam melalui proses kkn sampai penulisan Skripsi ini selesai.
9. Kepada Hipmi Pt. Unibos yang menjadi teman saya berkembang dan bertemu orang-orang hebat.

Makassar, Maret 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iiiv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
1. Batasan Masalah.....	5
2. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Rencana Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Kerjasama Internasional.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM.....	13
A. Kerjasama Indonesia - Malaysia dalam Bidang Kelapa Sawit.....	13

B.	<i>Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)</i>	16
C.	<i>Roundtable sustainable palm oil (RSPO)</i>	20
D.	Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	22
E.	Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO).....	24
BAB IV IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENDORONG KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.....		
A.	Mendorong Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Kegiatan Diplomatik	25
B.	Melakukan Diseminasi Informasi Publik	31
C.	Mendorong implementasi Sertifikasi Berkelanjutan	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		
A.	Kesimpulan.....	36
B.	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini dengan segala kemudahan akses informasi serta perkembangan teknologi, mendorong negara untuk membangun hubungan bilateral dengan negara lain demi memenuhi tujuan nasional mereka. Dengan melihat peluang tersebut, Indonesia dan Malaysia kemudian melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial-budaya pendidikan, tenaga kerja, dan beberapa bidang lainnya (Hakim, 2014). Salah satu kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dibidang ekonomi adalah komoditas Kelapa sawit. Kedua negara ini memutuskan bekerjasama untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit dan meningkatkan daya saing kelapa sawit di pasar global.

Berdasarkan data Indexmundi.com (2021) Indonesia dan Malaysia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. data pada tahun 2021 menunjukkan masing-masing mencapai 44.5 juta ton dan 18,7 juta ton pertahun, dengan penghasilan Indonesia 439 triliun pertahun dari ekspor. Minyak Kelapa sawit berasal dari tanaman buah sawit yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endocarp. Bagian yang memiliki kandungan minyak sawit disebut mesokarp (Muchtadi& Aziz. 2016).

Kelapa sawit merupakan salah satu produk dibidang pertanian yang menjadi andalan ekspor Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, kelapa sawit juga memberikan kontribusi penting dalam terbukanya lapangan pekerjaan bagian

masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Minyak kelapa sawit juga penting untuk sektor industri lain, karena minyak kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati yang diperlukan oleh industri yg lain. Seperti Makanan, kosmetik, cat, sabun, produk kebersihan serta sebagai sumber biodiesel (Sulistyanto, dkk. 2010).

Namun, dengan berbagai dampak positif yang dihasilkan kelapa sawit, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa banyak isu negatif yang melanda komoditas Kelapa sawit. Seperti, kelapa sawit menjadi penyebab hilangnya hutan tropis, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, punahnya keanekaragaman hayati, serta isu bahwa minyak kelapa sawit yang tidak bagus untuk kesehatan dan juga isu negatif lainnya (Saputra, 2020).

Dengan melihat potensi pada kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia serta permasalahan sawit yang ada. Indonesia dan Malaysia kemudian bekerjasama untuk membentuk suatu organisasi, yaitu *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Saat ini, *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) sedang bekerja keras untuk membantu negara-negara penghasil kelapa sawit mencapai target SDG's mereka. Selain itu, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga menetapkan enam bidang yang menjadi fokus utama upaya kolaboratif yang berasal dari kepentingan bersama dengan produsen minyak sawit. Bidang-bidang tersebut yaitu keberlanjutan minyak sawit, produktivitas petani kecil, riset dan inovasi kerjasama industri untuk menghasilkan nilai tambah, regulasi dan standar teknis (CPOPC, 2017).

ISPO (2017) memaparkan bahwa industri kelapa sawit adalah penunjang penting dalam mencapai tujuan SDG's terutama dalam mengatasi kemiskinan, pemerataan serta mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan, dengan adanya industri kelapa sawit dapat membantu pembangunan sarana dan prasaranan di wilayah sekitarnya. Meningkatnya penghasilan petani yang berasal dari kelapa sawit serta pengusaha dan pendapatan negara merupakan dampak positif dari industri kelapa sawit, namun tak dapat dipungkiri bahwa selama ini banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit terhadap kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk lahan kelapa sawit yang berpengaruh terhadap pemanasan global serta dinamika perdagangan internasional. Hal ini yang menjadi pemicu pemerintah untuk menerapkan prinsip sawit berkelanjutan dalam industri kelapa sawit baik dalam perkebunan maupun pabriknya. Minyak Sawit Berkelanjutan adalah produk yang diproduksi berdasarkan kriteria yang melarang segala bentuk deforestasi, bertambahnya kerusakan lahan gambut dan tidak adanya eksploitasi (NDPE) (Kurniawan, 2012).

Pada tahun 2004, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) didirikan sebagai sebagai staddar global yang mendorong perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan. RSPO memiliki seperangkat standar yang jelas, menjadikannya satu-satunya organisasi yang dihormati saat menangani advokasi lingkungan. Isu lingkungan hidup kini diakui oleh RSPO sebagai faktor yang harus diperhatikan dalam perdagangan internasional. Namun karena berbagai alasan beberapa perusahaan di Indonesia tidak berhasil mengadopsi standar RSPO, sehingga pada tahun 2011 dibentuk

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, Malaysia juga membentuk sistem sertifikasi sendiri yaitu *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)*

Adanya permintaan minyak sawit yang tinggi menyebabkan para pelaku kelapa sawit lebih sering melakukan penambahan lahan dibandingkan memanfaatkan lahan yang ada. Hal ini yang menjadi alasan deforestasi yang terus meningkat. Terlepas dari kenyataan bahwa perkebunan minyak sawit di Indonesia bukan satu-satunya penyebab deforestasi, namun komoditas perkebunan kelapa sawit terus menerus menghambat rehabilitasi hutan yang terdegradasi. Oleh karena itu, pengelolaan sawit berkelanjutan telah muncul sebagai prinsip pembangunan yang lebih baik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat umum memperoleh manfaat positif dari inisiatif tersebut.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang dituangkan dalam CPOPC merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan kelapa sawit yang saat ini dikenal memiliki citra buruk. Rusaknya citra kelapa sawit diakibatkan oleh kampanye negatif yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan yang melihat industri kelapa sawit berdampak buruk pada lingkungan, hal ini tentunya secara otomatis berdampak pada para petani kelapa sawit karena penjualan turunnya. Indonesia dan Malaysia bekerja sama untuk mengendalikan harga kelapa sawit di pasar global agar dapat meningkatkan penghasilan petani dan mengembalikn aset negara. CPOPC berupaya mendorong kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan sertifikasi ISPO dan MSPO.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

1. Aktor yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah Malaysia dan Indonesia serta individu yang ikut berperan dalam industri kelapa sawit.
2. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi agar lebih spesifik yakni kerjasama Indonesia-Malaysia melalui dan dampaknya terhadap keberhasilan sawit berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan SDG's.
3. Adapun rentang waktu pembahasan yang akan diteliti yakni sejak adanya kerjasama CPOPC 2015 – 2022.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan Masalah yang ingin diketahui yakni : “ *Bagaimana Implementasi kerjasama Indonesia-Malaysia melalui CPOPC dalam mendorong kelapa sawit berkelanjutan ?*”

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui bagaimana kerjasama CPOPC Indonesia-Malaysia dalam mewujudkan pengelolaan sawit berkelanjutan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangsi pengetahuan Terhadap Pegiat Studi Hubungan Internasional Terkait Adanya Kerjasama CPOPC yang melibatkan Indonesia dan Malaysia serta sawit berkelanjutan.

b. Berguna sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya di masa depan

c. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fisip Universitas Bosowa.

D. Kerangka Konseptual

1. Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Kerjasama internasional yang merupakan suatu kerjasama yang melibatkan beberapa negara yang ada di dunia. Kerjasama internasional adalah wadah bertemunya segala macam kepentingan yang berbeda diantara berbagai negara yang tidak bisa dicapai oleh negaranya sendiri. Kerjasama internasional timbul balik dari konflik internasional yang juga salah satu aspek dalam Hubungan internasional (Doughert & Robert, 2000).

Kerjasama internasional terbentuk Kerjasama internasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara yang bekerjasama. Kerjasama dilakukan dengan tujuan agar negara yang bekerjasama mendapatkan keuntungan. Kerjasama internasional terbagi diberbagai macam bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, keamanan dan pertahanan. Kerjasama dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Ada tiga jenis kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, kerjasama ini biasanya berbentuk hubungan

diplomasi, pendidikan dan kebudayaan. Kedua, Kerjasama Regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada dalam suatu wilayah atau kawasan yang sama, kerjasama ini dilakukan karena kepentingan bersama baik itu dibidang politik, ekonomi dan pertahanan. Dan terakhir adalah kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara maupun lebih. Kerjasama ini biasanya dilakukan antar negara dengan lembaga Internasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Prosedur melakukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, dan melibatkan pengumpulan data dari partisipan dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diidentifikasi. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal tertentu, seperti apa pun itu, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang bersangkutan (Pupu, 2009).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dilakukan agar penelitian menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, dengan maksud untuk mendeskripsikan atau menjabarkan tentang keadaan tertentu sesuai dengan situasi apa adanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan memahami secara mendalam terhadap konsep dan teori yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang

sesuai dengan situasi, dan juga memungkinkan untuk mengumpulkan data deskriptif yang terdiri dari kata dan frasa yang mungkin berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa laporan hingga Jurnal sebagai sumber penelitian. Selain itu, Sumber lain diperoleh melalui media massa elektronik / Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui arsip – arsip buku, jurnal tentang yang berisi pendapat atau teori yang berkaitan dengan pembahasan, wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yakni menghubungkan sumber data-data yang diperoleh dengan unit analisis melalui konsep atau pendekatan yang penulis gunakan.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan disusun ke dalam karya tulis ilmiah (Skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab Pertama (I), yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan, sistematika pembahasan.
- b. Bab Kedua (II), yaitu tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai konsep Ekosentrisme.

- c. Bab Ketiga (III), yaitu gambaran umum mengenai objek penelitian, yakni pembahasan tentang Kerjasama CPOPC Indonesia-Malaysia, Sawit berkelanjutan.
- d. Bab Keempat (IV), yaitu analisis pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Malaysia Melalui CPOPC dalam mendorong sawit berkelanjutan ?
- e. Bab Kelima (V), yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah sebuah hubungan melibatkan beberapa negara yang ada di dunia. Kerjasama internasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara yang bekerjasama. Kerjasama dilakukan dengan tujuan agar negara yang bekerjasama mendapatkan keuntungan. Ada tiga jenis kerjasama. Yang pertama, kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, kerjasama ini biasanya berbentuk hubungan diplomatik, pendidikan dan kebudayaan. Kedua, Kerjasama Regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada dalam suatu wilayah atau kawasan yang sama, kerjasama ini dilakukan karena kepentingan bersama baik itu dibidang politik, ekonomi dan pertahanan. Dan terakhir adalah kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara maupun lebih. Kerjasama ini biasanya dilakukan antar negara dengan lembaga Internasional.

- a. Menurut Perwita dan Yani (2005) kerjasama Internasional adalah kerjasama yang timbul oleh sistem kehidupan internasional. Kerjasama ini muncul karena orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Kerjasama internasional terbagi diberbagai macam bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, keamanan dan pertahanan. Kerjasama dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata (Perwita dan Yani, 2005: 34).

b. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional merupakan sebuah bentuk pandangan tentang bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang menghasilkan sesuatu dalam sebuah bentuk pertemuan, di promosikan serta dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan. pandangan atau harapan yang ingin di capai oleh negara diputuskan dalam satu kebijakan bersama dengan negara lainnya dibantu negara-negara lainnya sesuai tujuan, nilai.persetujuan, sesuai yang dihadapi. Ada beberapa alasan negara ingin melakukan kerjasama, yaitu :

1. Negara melakukan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya yang disebabkan oleh keterbatasan negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berhubungan dengan pengurangan biaya.
3. Adanya masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan negatif suatu negara yang menarikan dampak pada negara lainnya (Holsti, 1995: 362)

c. Menurut Keohan (1984) kerjasama internasional dapat terjadi ketika aktor-aktor dunia internasional seperti negara berada pada sebuah situasi dimana kebijakan yang dimiliki negara dalam memenuhi kepentingannya dianggap sebagai sebuah bentuk penghalang bagi tercapainya tujuan negara lain. Atas dasar situasi ini, kerjasama internasional kemudian hadir dan terbentuk ketika setiap negara yang memiliki kepentingan menyesuaikan sikap mereka melalui

bentuk kesatuan koordinasi kebijakan. Ada dua poin penting mencakup konsepsi dari kerjasama internasional ini, yang di antaranya

1. Kerjasama internasional berasumsi bahwa perilaku setiap aktor negara sangat dipengaruhi oleh berbagai tujuan-tujuan kepentingan yang dimiliki dan dianggap rasional,
2. Kerjasama internasional yang terjadi akan menghasilkan keuntungan untuk setiap aktor negara yang tidak harus sama namun bersifat timbal balik (Zulkifli, 2012, pp.17-21).

d. Menurut Willian D Coplin (1971) Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang terbentuk dengan alasan negara ingin melakukan hal baru untuk mencapai tujuan bersama.

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua Negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan Multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua Negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama Multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk Intstitusioanl yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan Pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai Bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, Dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Dougherty & Pflatzgraff,1997:420).

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kerjasama Indonesia - Malaysia dalam Bidang Kelapa Sawit

Pada 25 Mei 2006, Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan Memorandum kerjasama bilateral mengenai komoditas perkebunan. Komoditas yang ada dalam kerjasama tersebut antara lain kelapa sawit, kakao lada, jarak pagar dan tanaman-tanaman lainnya. Penandatanganan MoU dilakukan dengan tujuan agar memperkuat posisi kedua negara yang merupakan negara pemasok komoditas perkebunan yang terbesar di dunia, terutama dalam bidang kelapa sawit. Yang dimana dari total produksi minyak sawit dunia 80% adalah hasil produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia, serta mendominasi hampir 90% dalam perdagangan minyak kelapa sawit.

Hal ini yang menjadi pemicu bagi Indonesia dan Malaysia Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat keberadaan mereka di bidang minyak sawit di pasar dunia. Dan tentunya kerjasama tersebut akan berdampak pada kesinambungan industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Selain itu, alasan Indonesia melakukan kerjasama adalah karena kekhawatiran terhadap Malaysia yang bisa kapan saja mencabut investasinya dari Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya volume produksi kelapa sawit yang dihasilkan dan menyebabkan kerugian. Sedangkan, alasan Malaysia ingin melakukan kerjasama ini adalah karena kendala Malaysia akan Keterbatasan lahan yang mereka miliki serta keterbatasan tenaga kerja (MPOA Annual report, 2006).

Dengan lingkungan yang strategis, Indonesia memiliki banyak potensi, namun tidak akan berkembang jika tidak ada investasi. Banyak investor dari Malaysia yang telah berinvestasi di Indonesia setelah mengetahui bahwa lingkungan negara dapat digunakan sebagai sumber kelapa sawit. Untuk itu, pada tanggal 11 Januari 2008, Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pembentukan komite perdagangan dan investasi bersama. Mari Elka Pangestu selaku menteri perdagangan RI dan Rafidah Aziz menteri perdagangan Malaysia menandatangani MoU tersebut di Malaysia yang disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kemendagri, 2014)

Dengan terjalannya Kerjasama tersebut, Indonesia dan Malaysia kemudian berfokus pada peningkatan produksi kelapa sawit yang membuat keduanya saling bergantung dalam hal pemenuhan barang dan jasa. Dima peningkatan produksi ini berdampak pada naiknya ekonomi kedua negara yang di sebabkan oleh adanya permintaan pasar dari berbagai negara lainnya. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati pembentukan Indonesia-Malaysia Palm Oil Group (IMPOG) yang digunakan sebagai wadah Indonesia dan Malaysia dalam menyusun program kerjasama, penelitian dan pengembangan, komunikasi dan strategi agar mendapatkan kesepakatan yang sama dalam upaya menghadapi tekanan akan industri kelapa sawit di kedua negara.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan tersebut berdampak pada peningkatan Industri minyak kelapa sawit dan kontributor penting dalam pasar minyak nabati dunia, Hal ini tentunya mendorong berbagai pihak untuk

mengembangkan perkebunan kelapa sawit, baik itupihak pemerintah maupun swasta Dan individu. Namun meskipun industri Kelapa sawit ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan Malaysia tetapi bagi beberapa negara serta para lembaga pecinta lingkungan melihat menemukan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. industri kelapa sawit mendapat kritikan sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi dan juga dianggap sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca.

Kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya menjaga lingkungan hiduo membuat semakin banyaknya muncul permintaan akan produk minyak sawit beserta produk olahan lainnya yang ramah lingkungan ini, karena produk yang tidak ramah lingkungan dipersepsikan sebagai produk yang tidak berkesinambungan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan mengubah cara industr kelapa sawit dalam beroperasi, terutama di Indonesia dan Malaysia karena Produk olahan dari kedua negara ini sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor.

Dengan adanya tekanan mengenai isu negatif tentang pembangunan kelapa sawit maka Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama untuk menghadapi isu negatif dari beberapa LSM/NGO pecinta lingkungan terkait dengan kerusakan hutan akibat dari peningkatan luas lahan dan produksi/aktivitas kelapa sawit kedua negara ttersebut Indonesiadan Malaysia juga melakukan kerjasama bilateral dengan penandatanganan beberapa Memorandum of Understanding yang terkait dengan komoditi kelapa sawit yang menjadi produk unggulan kedua negara dan dengan demikian kedua negara bisa menghadapi tantangan global kedepanya.

MoU antara Indonesia dan Malaysia ini berisi tentang perdagangan, investasi, tenaga kerja dan kampanye menghadapi isu lingkungan.

Setelah itu muncul isu negatif tentang kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, isu inipun yang akhirnya melatarbelakangi terbentuknya MoU 2010. Memorandum of Understanding tahun 2010 membahas mengenai kerjasama untuk menghadapi kampanye negatif dari para NGO atau LSM pecinta lingkungan tentang Industri kelapa sawit dan kesepakatan terbentuknya Indonesia-Malaysia Palm Oil Group (IMPOG) yang merupakan forum antar produsen kelapa sawit Indonesia dan Malaysia.

Indonesia - Malaysia Palm Oil Group (IMPOG) Dipimpin oleh APMI yang sekaligus sekretariat, IMPOG memiliki enam anggota Asosiasi. Yaitu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Malaysia Palm Oil Association (MPOA), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Pemilik Perkebunan Minyak Sawit Serawak (SOPPOA), Federal Land Development Authority (FELDA), dan Asosiasi Investor Perkebunan Malaysia di Indonesia (APMI)

B. *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*

1. Sejarah terbentuknya *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*

Sejak tahun 2006, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sudah gear melakukan pertemuan dengan Malaysia dalam rangka membicarakan kerjasama mereka di bidang industri CPO. Namun, hingga habis masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kesepakatan itu

masih belum bisa dicapai. Setelah masuk masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah kembali mengupayakan terjalannya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengutus Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membahas ini dengan pemerintah Malaysia.

Pasca penandatanganan kerjasama, Malaysia lebih dahulu meratifikasi pada tanggal 24 Mei 2016 disusul dengan Indonesia meratifikasi perjanjian CPOPC pada tanggal 25 Mei 2016. CPOPC menjadi satu – satunya bentuk kerjasama inter-governmental dibidang kelapa sawit. Sebelumnya stakeholder industri kelapa sawit di Indonesia secara individu tergabung dalam kerjasama internasional dibawah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk dapat melakukan ekspansi ke pasar internasional, khususnya Uni Eropa.

Pembentukan CPOPC oleh Indonesia dengan Malaysia sebagai dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ini yang mendapat respon negatif dari masyarakat internasional. Pemberitaan yang dibuat mengarah bahwa pembentukan CPOPC ini berpotensi semakin merusak lingkungan terutama hutan akibat aktivitas produksi dan pembukaan lahan kelapa sawit yang tidak terkendali. Pemberitaan ini mencuat pasca Resolusi yang dikeluarkan oleh parlemen Uni Eropa.

Uni Eropa mengeluarkan anti-palm oil sentiment kepada negara anggotanya. Sikap Uni Eropa ini merupakan bentuk himbauan untuk tidak menggunakan hasil olahan minyak kelapa sawit karena industri kelapa sawit sendiri sangat tidak bersahabat dengan lingkungan. Hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak

melanjutkan kesepakatan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia pada bidang kelapa sawit ini.

Sebelumnya pada tahun yang sama pemerintah Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement ditengah isu kebakaran hutan Indonesia setelah 14 tahun perjanjian tersebut ditandatangani. Keputusan menandatangani kesepakatan CPOPC dengan Malaysia sebagai sesuatu yang kontradiktif atas apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia ditengah isu kebakaran hutan dan aktivitas hutan di Indonesia yang tengah menjadi sorotan. CPOPC dianggap justru akan meningkatkan produksi kelapa sawit oleh negara produsen sehingga juga akan memperparah kondisi hutan di Indonesia. Selain itu, sebelumnya kerjasama kelapa sawit dunia lebih bersifat bilateral dan CPOPC merupakan kerjasama multilateral pertama di level negara pada bidang kelapa sawit.

Melihat potensi kelapa sawit yang besar serta tingginya ketergantungan negara – negara atas minyak nabati, maka CPOPC tentunya mendapatkan perhatian lebih. Sebelumnya ada bentuk kerjasama serupa di dunia yaitu OPEC yaitu kerjasama antar negara produsen minyak dunia. OPEC sendiri memiliki kontrol penuh atas harga minyak dunia dan memiliki regulasi yang jelas untuk negara – negara produsen minyak.

Pada awalnya Indonesia melakukan pertemuan dengan Malaysia untuk menyampaikan inisiatif tentang kerjasama dalam pembentukan CPOPC. Setelah pertemuan tersebut Indonesia dan Malaysia menandatangani piagam pembentukan Dewan Negara-Negara penghasil Minyak Sawit (CPOPC) di Kuala Lumpur, hari

Sabtu tanggal 21 November 2015. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Uggah Embas yang disaksikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.

Setelah membahas CPOPC, kedua pihak juga mendeklarasikan *Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil* atau e+POP. Ini merupakan usulan terkait kerangka prinsip global terhadap minyak sawit berkelanjutan. Seperti yang dipaparkan oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas, Datuk Amar Douglas Uggah (2015), bahwa E+POP memiliki 9 prinsip yang berdasar pada undang-undang dan peraturan kedua negara dan akan dibandingkan dengan standar internasional lainnya (Raj, 2015). Selain itu, E+POP juga menggabungkan poin-poin terpenting yang terkandung didalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sehingga visi, misi dan tujuan akan sejalan (Himawan, 2016).

CPOPC didirikan dengan tujuan untuk mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama industri minyak sawit di antara negara-negara anggotanya. Hal ini akan semakin memastikan bahwa industri minyak sawit berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Indonesia dan Malaysia merupakan Anggota Pendiri dari CPOPC. Keanggotaan CPOPC akan dibuka untuk seluruh negara-negara pembudidaya kelapa sawit lainnya, antara lain Brazil, Colombia, Thailand, Ghana, Libberia, Nigeria, Papua New Guinea, Filipina, dan Uganda.

CPOPC merupakan satu – satunya institusi kelapa sawit yang berada pada level negara. Selain itu CPOPC memiliki mekanisme terkait promosi, pembangunan, dan penguatan kerjasama dalam bundidaya dan industri kelapa sawit di antara negara – negara produsen kelapa sawit, untuk menjamin keberlangsungan industri minyak sawit, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan anggotanya.

Ada beberapa poin penting yang menjadi fokus CPOPC yaitu :

- a. Menyediakan konsultasi pembangunan industri minyak kelapa sawit kepada pemangku kepentingan di negara-negara produsen kelapa sawit
- b. Meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit
- c. Membentuk kerangka global dengan prinsip minyak sawit yang berkelanjutan termasuk dalam zona hijau
- d. Mengantisipasi hambatan yang akan terjadi dalam proses perdagangan minyak kelapa sawit
- e. Bekerjasama dalam penelitian, pengembangan serta pelatihan mengenai industri kelapa sawit.

C. *Roundtable sustainable palm oil (RSPO)*

Roundtable sustainable palm oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004. RSPO merupakan sebuah wadah untuk mendorong perusahaan dan perkebunan kelapa sawit untuk mengadopsi praktik perkebunan yang berkelanjutan. RSPO membentuk standar dan kriteria yang ketat mengenai pengimplementasian sawit berkelanjutan. RSPO menjadi sebuah bentuk tekanan sosial dari konsumen

terhadap produsen kelapa sawit agar memperhatikan keberlangsungan hewan dan hutan. Ada 8 (delapan) kriteria yang ditetapkan RSPO untuk perusahaan yang ingin disertifikasi yaitu, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, Transparansi, berkomitmen sebagai bisnis jangka panjang, memiliki praktik yang baik, memiliki tanggungjawab yang baik terhadap lingkungan, konservasi terhadap keanekaragaman hayati, berkomitmen terhadap inovasi berkelanjutan, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Yang ada disekitarnya (Nikoloyuk, dkk. 2010)

Nazir Foead (2014) Direktur konservasi WWF Indonesia, mengatakan RSPO adalah satu-satunya asosiasi non-profit yang berupaya menyatukan berbagai pihak dalam sektor industri sawit berkelanjutan, mulai dari produsen, pedagang/manufaktur, peritel, bank, investor, masyarakat serta LSM (National Geographic Indonesia, 2011 : 44).

Menurut Kohne (2014) RSPO hadir sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang semakin parah. RSPO sebuah institusi not-for-profit yang kemudian menyatukan stakeholder atau pemangku kepentingan dari sektor industri kelapa sawit mengembangkan dan menerapkan standar global untuk kelapa sawit. Semetara ini, RSPO mengatur dan mengembangkan seperangkat kriteria lingkungan dan sosial yang harus di patuhi oleh perusahaan agar menghasilkan *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO). Saat ini anggota RSPO tercatat lebih dari 3000 stakeholder yang terdiri dari produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang, produsen barang konsumsi, pengecer, bank, investor, serta organisasi sosial dan non-pemerintah (LSM).

D. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah kebijakan yang berbentuk sertifikasi produk sawit yang dibuat oleh pemerintah yang dikembangkan sebagai wujud tata kelola industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. ISPO berupaya untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit di pasar global serta berkontribusi dalam usaha untuk mengurangi emis gas rumah kaca. Selain itu, ISPO juga berfokus pada masalah lingkungan serta turut mengakomodasi Isu kemiskinan yang dialami oleh kelompok petani kecil (BPPK Kemenlu, 2019).

ISPO merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang ada didalamnya terkhusus dibidang perlindungan lingkungan dan Pengentasan kemiskinan serta tercapainya kesejahteraan bagi semua. Dengan adanya ISPO sebagai sertifikasi diharapkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di indonesia dapat meningkatkan kepedulian atas pentingnya memproduksi kelapa sawit yang berpengaruh terhadap daya saing minyak kelapa sawit indonesia dipasar dunia. Ada beberapa sistem sertifikasi ISPO, yaitu :

1. Penilaian Usaha perkebunan

Perusahaan atau perkebunan yang ada di Indonesia wajib memiliki izin Usaha yang kemudian dilakukan penilaian dan pembinaan secara rutin setiap setahun maupun tiga setahun sekali. Penilaian dilakukan dengan tujuan agar dapat menjaga kesinambungan dan keberlangsungan usaha perkebunan serta untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melakukan kewajibannya. Prose

penilaian dilakukan dengan beberapa aspek yaitu legalitas, manajemen, kebun, pengelolaan hasil, sosial, ekonomi, wilayah, lingkungan serta pelaporan.

2. Syarat sertifikasi ISPO,

Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, pelaku usaha harus mematuhi beberapa ketentuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan pabrik kelapa sawit. Pedoman ISPO didasarkan dari empat hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang terdapat dalam beberapa prinsip berikut, yaitu :

- 1) Sistem Perijinan dan manajemen perkebunan;
- 2) Penerapan pedoman budidaya dan pengolahan kelapa sawit;
- 3) Pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Tanggungjawab terhadap pekerja;
- 5) Tanggungjawab sosial dan komunitas;
- 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 7) Peningkatan usaha secara berkelanjutan;

3. Bentuk Penilaian Pelaku Usaha

Adapun beberapa syarat dalam pengajuan sertifikasi ISPO, yaitu pertama, perusahaan harus melakukan pelatihan untuk dapat memahami prinsip dari ISPO. Kedua, dilakuka. Analisa kesenjangan sebagai bentuk menguji tingkat pemenuhan perusahaan terhadap ISPO. Ketiga, perusahaan perlu melakukan pembenahan sesuai prosedur yang ditentukan oleh ISPO. Ke empat, pengajuan sertifikasi dapat diajukan oleh perusahaan setelah melakukan perbaikan yang ditentukan ISPO.

Masa berlaku ISPO adalah lima tahun sebelum dilakukan penilaian ulang dan pengawasan dilakukan sekali setahun.

E. Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO)

Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) merupakan suatu skema nasional yang berlaku di Malaysia dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi MSPO disahkan oleh pemerintah Malaysia pada 19 November 2013. Standar MSPO menyeimbangkan antara manajemen produksi minyak kelapa sawit dengan hukum dan peraturan nasional yang ada. MSPO menyediakan aplikasi untuk audit, pengembangan sertifikasi, pedoman, persyaratan akreditasi. Informasi lembaga sertifikasi, penelusuran rantai pasokan, penerbitan lisensi dan prosedur untuk menangani keluhan. Adapun prinsip-prinsip MSPO yang harus terpenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi MSPO yaitu :

- 1) memiliki komitmen dan tanggung jawab manajemen
- 2) bersifat transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan prinsip MSPO.
- 3) Mematuhi semua peraturan yang ada.
- 4) memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, keselamatan pekerja
- 5) Memiliki program pengelolaan lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan dan pembuangan limbah, dll.
- 6) memiliki praktik atau operasi yang terbaik
- 7) memastikan bahwa penanaman kelapa sawit tidak memiliki dampak kelapa sawit terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENDORONG KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

A. Mendorong Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Kegiatan Diplomatik

Berdasarkan pendapat perwita dan yani serta Holsti mengenai konsep kerjasama internasional yang muncul karena adanya masalah dan kepentingan nasional yang sama dan dapat diselesaikan dengan kerjasama yang kemudian dilakukan dengan bentuk pertemuan. Hal ini yang dilakukan Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC dengan merancang berbagai upaya diplomatik. Upaya Diplomatik yang dilakukan CPOPC dilaksanakan dalam kerangka multilateral dengan melibatkan banyak negara, yang dimana bukan hanya anggota CPOPC, melainkan negara-negara produsen CPO lainnya juga turut hadir.

Upaya Diplomatik yang dilakukan oleh CPOPC yaitu Ministerial Meeting (Pertemuan Menteri) dan Joint Mission (Misi Bersama). Ministerial Meeting adalah pertemuan tingkat menteri antara negara yang menjadi anggota CPOPC bersama negara produsen sawit mentah yang membekas mengenai isu-isu terkait hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Industri CPO dan negara produsen sawit.

Pertemuan ini dilakukan oleh CPOPC minimal sekali setahun, Saat ini Pertemuan ini telah dilaksanakan sepuluh kali. Resolusi dari Uni Eropa mengenai bahan bakar yang terbarukan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi

oleh produsen CPO, khususnya Indonesia dan Malaysia sebagai produsen CPO terbesar dengan nilai ekspor yang tinggi ke Uni Eropa, sehingga isu ini menjadi fokus pembahasan dalam beberapa Pertemuan Menteri dari CPOPC.

Kerjasama Indonesia - Malaysia melalui CPOPC dari awal pembentukam masih berfokus melawan kampanye negatif dengan melakukan promosi agar berdampak pada Kenaikan Ekonomi, menambah kerjasama, dan belum berfokus dalam promosi mengenai upaya mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, khususnya lingkungan. Padahal CPOPC dibentuk Untuk melawan kampanye negatif yang berasal dari Eropa mengenai kerusakan lingkungan. Dapat dibuktikan oleh pembahasan yang diagendakan CPOPC setiap Pertemuan Mneteri yang Diselenggarakan oleh CPOPC.

Isu yang dibahas dalam Pertemuan Menteri yang diselenggarakan CPOPC bersifat umum, yaitu mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit, termasuk RED II Uni Eropa. Pertemuan pertama atau disebut dengan Inaugural Ministerial Meeting (IMMPOPC) diselenggarakan oleh indonesia dan Malaysia sebagai pendiri CPOPC di Nusa Dua Convention Center, Bali pada 1-3 November 2017. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara produsen kelapa sawit seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria dan Guatemala.

Pertemuan Menteri pertama ini adalah momentum paling penting untuk mendorong kesamaan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan diantara negara produsen kelapa sawit dinilai dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen di tantaran perekonomian global. Pada IMMPOPC ini membahas berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak

sawit, terkhusus isu lingkungan dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan Uni Eropa beberapa waktu terakhir.

Pertemuan Menteri yang ke-2 diselenggarakan pada 17-18 November 2019 di Hotel Pullman Kuala Lumpur, Malaysia. pertemuan ini dihadiri beberapa negara produsen kelapa sawit dari Afrika, Amerika Tengah, Amerika Latin, serta negara-negara Asia Pasifik. Pembahasan di pertemuan ini yaitu mengenai cara memfasilitasi pertukaran pandangan antara negara-negara produsen minyak sawit di berbagai kepentingan bersama seperti minyak sawit berkelanjutan, kerja sama industri, dan pengembangan petani kecil. CPOPC berkomitmen untuk dalam mengatasi masalah serta mengidentifikasi dan mengoptimalkan peluang bidang-bidang tersebut (CPOPC, 2019).

Pada pertemuan Menteri ke-2 CPOPC mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan seperti mendorong negara-negara produsen CPO dalam meningkatkan kerja sama dan mengembangkan strategi untuk mendapatkan harga minyak sawit ke tingkat yang menguntungkan terutama bagi petani kecil. Selain itu, CPOPC mendorong untuk memperluas konsumsi biofuel untuk menyerap lebih banyak CPO di pasar global, salah satu bentuknya seperti uji coba B30 di Indonesia pada 2019, implementasi B20 Malaysia pada 2020, dan 2020 Thailand juga mengimplementasikan program B10. yaitu dengan menyerukan persatuan dan solidaritas antar negara produsen kelapa sawit melalui kampanye-kampanye tandingan dalam memerangi pembatasan CPO yang coba dilakukan oleh pihak-pihak lain (CPOPC, 2019).

Pada dasarnya Pertemuan Menteri yang pertama hingga Pertemuan Menteri ke-4 lebih memfokuskan pada membentuk kesamaan pandangan, membangun jejaring yang solid dalam internal CPOPC. MM kelima dilaksanakan pada 8 November 2018. Di pertemuan ini CPOPC Membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit diantaranya, penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dalam pasar global, isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor, dan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar di tengah tantangan pasar global.

Selain itu, di pertemuan ini mereka lebih membahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menanggulangi tantangan-tantangan dalam industri kelapa sawit. Melalui pertemuan ini CPOPC secara institusional menyatakan komitmennya untuk mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam capaian produksi global, dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP), program peremajaan sawit, dan pengadaan Business and Smallholders Forum pada tahun 2019 (Suwiknyo, 2018).

Dalam pertemuan ini juga turut membahas masalah yang ditimbulkan dari resolusi RED II Uni Eropa, langkah-langkah strategis juga dirumuskan dalam pertemuan ini, diantaranya, negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang merupakan bagian dari *European Union's Renewable Energy Directive II* (RED II) karena dinilai sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.

Selain itu, CPOPC juga akan terus mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan (Suwiknyo, 2018).

CPOPC mulai berfokus pada implementasi kelapa sawit berkelanjutan diselenggarakan pada tahun 2019. Dalam pertemuan ini CPOPC membahas mengenai beberapa topik tentang tantangan industri kelapa sawit yaitu peningkatan produktivitas petani kecil, penanggulangan atas pembatasan perdagangan CPO di negara-negara konsumen utama, dan penanggulangan masalah pasar konsumen utama (CPOPC, 2019).

Dalam pertemuan ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu pertama, kesepakatan untuk mendorong negara-negara produsen CPO untuk memperbaiki harga/meningkatkan harga, terutama untuk pekebun rakyat. Kedua, kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak CPO di pasar global termasuk melalui implementasi B30 oleh Indonesia pada 2020, Malaysia untuk B20, dan Thailand untuk B10, ketiga, membangun satu standar bersama sertifikasi CPO yang sustainable di tahun 2020. keempat, merumuskan langkah-langkah konkrit dalam upaya menghadapi kampanye negatif, termasuk melalui WTO. kelima, mendorong keanggotaan negaranegara produsen sawit lainnya, dan keenam, meningkatkan kesejahteraan di perkebunan rakyat. Upaya lanjutan dibahas CPOPC di Pertemuan Menteri ke 8 yang dilaksanakan pada November 2020.

Poin penting yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini antara lain, perlunya negara-negara anggota dan pengamat (negara non-anggota tetap) untuk melawan kampanye anti sawit Uni Eropa dengan memanfaatkan platform CPOPC, pentingnya industri kelapa sawit untuk mengatasi agenda berkelanjutan dengan mengadopsi standar tinggi dan praktik terbaik pada lingkungan, satwa liar, kesehatan dan kesejahteraan, serta kemakmuran bersama, dan pentingnya mendorong CPOPC untuk lebih proaktif melakukan kampanye positif di negara konsumen dan produsen, tidak hanya menggunakan pendekatan defensif, tetapi juga mengedukasi konsumen untuk menggunakan standar umum dalam mengukur keberlanjutan berdasarkan tiga dimensi keberlanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, sesuai dengan SDG's (CPOPC, 2021a).

Selanjutnya, Pertemuan Menteri ke sepuluh yang dilaksanakan pada November 2022, Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC sepakat menggunakan Krisis akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina untuk meningkatkan promosi Sawit berkelanjutan di negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat. Mereka memanfaatkan Krisis pangan dan energi akibat agresi Rusia di Ukraina sebagai waktu yang tepat untuk mengampanyekan sawit sebagai komoditas alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terjadinya hambatan distribusi 5,5 juta ton biji-bijian (*grains*) dari Ukraina yang menjadi salah satu sumber pangan dan energi (*biofuel*) dunia menyebabkan banyaknya permintaan Bahan Bakar Minyak dari negara-negara menjadi kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk menyuplai sawit mentah (CPO) 48 juta dan 16 juta ton ke pasar dunia.

Selain Itu, anggota CPOPC sepakat untuk memanfaatkan kepemimpinan Republik Indonesia (RI) di G20 sebagai tempat untuk mengampanyekan sawit berkelanjutan (Sustainable Palm Oil). Indonesia dan Malaysia menyampaikan advokasi tersebut demi meluruskan kampanye buruk (*Black Campaign*) mengenai sawit yang sering disuarakan di negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, dalam pertemuan tingkat menteri yang ke-10 CPOPC itu membahas rencana untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di G20 yang membahas mengenai minyak nabati berkelanjutan “*The G20 Sustainable Vegetable Oil Summit*” (CPOPC, 2022).

B. Melakukan Diseminasi Informasi Publik

Berdasarkan poin ketiga dan empat dari Pendapat Holstli mengenai alasan terjadinya kerjasama internasional yaitu adanya ancaman terhadap industri kelapa sawit yang berasal dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Uni Eropa.

a. Menerbitkan Artikel mengenai bantahan terhadap Kampanye Negatif Kelapa Sawit

Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC melakukan sebuah diseminasi informasi yang diterbitkan melalui artikel untuk membantah kampanye-kampanye negatif yang dihadapi CPO, salah satunya dalam artikel berjudul “*Secretariat Responding to The Statement of The European Commission on Palm Oil Sustainability*”. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa minyak, dan kelapa sawit menggunakan paling sedikit pupuk dan produk fitosanitasi 0,4 kg pestisida per ha/tahun dibandingkan dengan pada tanaman kedelai, yang setara dengan 100 kali lebih sedikit pestisida yang diterapkan untuk jumlah minyak nabati yang sama

yang dihasilkan. Berdasarkan data CPOPC organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, hingga Badan Pembangunan Prancis AFD, juga telah mengutip data ini (CPOPC, 2020a).

CPOPC juga mengutip penyelidikan dari New York Times yang menyoroiti bagaimana subsidi pertanian proteksionis Uni Eropa mendorong polusi dan perusakan lingkungan di dalam perbatasan Eropa. Dalam artikel ini juga dinyatakan sementara Uni Eropa sendiri melalui subsidi tersebut mendorong perusakan hutan di perbatasan Eropa, para pejabat Uni Eropa pada saat yang sama justru mengkampanyekan untuk melarang sawit yang disebut dalam artikel tersebut “terbang keliling dunia dan menceramahi orang lain” (CPOPC, 2020).

CPOPC juga merilis artikel terbaru yang berisi tentang sikap Belgia yang mendukung pelarangan minyak sawit. Dalam artikel yang berjudul “*CPOPC Objects to The Draft Royal Decree of Belgium*” CPOPC menyatakan bahwa sikap tersebut sangat kontras dengan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa untuk mempromosikan budidaya benih minyak untuk biofuel yang menggunakan bahan kimia dan pestisida ekstensif yang telah terbukti merusak lingkungan.

CPOPC juga menyatakan dalam artikel ini bahwa penghancuran gambut yang mengkhawatirkan di seluruh Eropa juga disebabkan oleh kebijakan ini. CPOPC menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah mundur tidak hanya dalam hubungan antara ASEAN dan UE dan komitmen internasional perdagangan yang adil, tetapi juga komitmen pada keberlanjutan yang dibuat dibawah Kelompok Kerja Bersama ASEAN-EU untuk Minyak Sayuran. CPOPC dalam

artikel ini juga mendorong Belgia untuk mencabut Royal Dekrit yang telah dikeluarkan tersebut (CPOPC, 2021).

C. Mendorong implementasi Sertifikasi Berkelanjutan

Ada beberapa hal yang dilakukan CPOPC dalam mendorong Implementasi Sertifikasi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan yaitu

- a. Kebijakan *Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil* (E+POP)

Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil E+POP merupakan usulan terkait kerangka prinsip global terhadap minyak sawit berkelanjutan. E+POP memiliki sembilan prinsip yang terdiri dari gabungan poin-poin dari Indonesia Sustainable palm Oil (ISPO) dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) sebagai upaya mewujudkan tujuan CPOPC yaitu mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan.

E+POP adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh CPOPC untuk mendorong implementasi sertifikasi berkelanjutan, hal ini sesuai dengan pendapat Holsti bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh kerjasama internasional dapat membantu negara dalam mencapai kepentingannya yaitu meningkatkan ekonomi serta melawan kampanye negatif dan memunculkan kepercayaan pasar global terhadap kelapa sawit dengan menggunakan kebijakan tersebut (Himawan, 2016).

- b. peningkatan implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP)

Good Agricultural Practices (GAP) adalah pedoman budidaya sawit yang baik untuk mendapat hasil tanaman sawit yang berkualitas dan sesuai dengan sertifikasi berkelanjutan. Tujuan penerapan standar pekerjaan dalam setiap usaha

pertanian adalah untuk memperbaiki proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Indikator yang menjadi acuan penilaian khusus untuk tanaman kelapa sawit yang diterapkan pada beberapa kegiatan adalah yaitu :

1. Teknik budidaya lahan: penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, penggunaan bibit unggul, pengendalian HPT, penyulaman, penyiangan dan pemupukan,
2. Pengelolaan kebun: pemeliharaan piringan dan tepi. pemeliharaan pokok tanaman, pemangkasan serta taksasi produksi,
3. Panen TBS: persiapan sebelum panen, kriteria hasil panen, cara panen, organisasi panen.

c. Pengadaan Business and Smallholders Forum

Sebagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani kecil, CPOPC membuat webinar yang berjudul “Tantangan Petani Mencapai Sertifikasi Berkelanjutan & Pembelajaran”

Webinar ini dilakukan dengan cara hybrid. Dengan tujuan agar peserta mendapatkan wawasan secara langsung. Dalam webinar ini bentuk serangkaian lokakarya petani yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan di antara petani kecil di Indonesia untuk mencapai sertifikasi berkelanjutan dan memetakan kegiatan potensial untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mencapai langkah-langkah keberlanjutan.

Sebagai upaya di webinar ini untuk menambah wawasan kepada petani kecil perwakilan petani kecil dipilih dari Indonesia dan Malaysia. Mereka kemudian diundang untuk mengunjungi Perkebunan Kelapa Sawit, Galeri Kelapa Sawit, Unit Penghasil Benih, dan Museum Perkebunan Indonesia di PPKS yaitu Balai Penelitian Kelapa Sawit Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada perumusan masalah yakni, “ Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia - Malaysia melalui CPOPC dalam mendorong kelapa sawit berkelanjutan ? ” maka dapat dilihat melalui upaya yang kedua negara ini lakukan demi menghadapi kampanye hitam dan menghilangkan citra buruk kelapa sawit serta mendorong kelapa sawit berkelanjutan melalui CPOPC. Dengan menggunakan konsep kerjasama Internasional untuk melihat bagaimana upaya kerjasama melalui CPOPC ini dalam mendorong sawit berkelanjutan.

CPOPC awalnya dibentuk Sebagai upaya Indonesia dan Malaysia melawan Kampanye negatif mengenai kelapa sawit serta meningkatkan citra sawit di pasar global. Sebagai upaya dari tujuan tersebut, CPOPC mengadakan pertemuan menteri yang dilakukan minimal sekali setahun. Selain itu, CPOPC juga merilis artikel sebagai bantahan terhadap kampanye - kampanye negatif mengenai kelapa sawit. CPOPC berupaya mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan pada tahun 2019 yang dibahas dalam pertemuan menteri yang dilaksanakan oleh CPOPC.

Selain itu, untuk mendorong implementasi sawit berkelanjutan CPOPC juga mendeklarasikan sebuah kebijakan yaitu E+POP yang merupakan usulan terkait kerangka prinsip global terhadap minyak sawit berkelanjutan. E+POP ini terdiri dari sembilan prinsip yang merupakan gabungan poin-poin yang ada dalam *Indonesia Sustainable palm Oil (ISPO)* dan *Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO)* sebagai upaya mewujudkan tujuan CPOPC yaitu mewujudkan kelapa

sawit berkelanjutan. Kemudian, CPOPC juga berupaya meningkatkan implementasi *Good Agricultural Practices* (GAP) yang merupakan sebuah pedoman budidaya sawit yang baik dan berkelanjutan serta mengadakan sebuah webinar untuk menambah wawasan kepada petani kecil baik di Indonesia maupun Malaysia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam Skripsi ini, yakni :

- 1) Sesuai dengan pembahasan bab empat dapat dilihat bahwa CPOPC belum efektif dalam mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan, hal ini terbukti oleh masih banyaknya kampanye negatif yang muncul terutama mengenai isu lingkungan dan sosial. Untuk itu, kedepannya CPOPC khususnya Indonesia harus lebih berfokus pada implementasi sawit berkelanjutan serta berupaya menguatkan ISPO dengan menggunakan pendekatan ekosistem yang akan menghasilkan sawit berkelanjutan.
- 2) CPOPC juga harus lebih banyak membuat kegiatan edukasi yang dapat menjangkau dan melibatkan seluruh petani kecil, agar petani kecil juga mengetahui dan bisa terjun dalam perdagangan ekspor dan impor.
- 3) Berdasarkan fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa GAP juga belum diterapkan dengan optimal karena selain masih banyak petani yang belum mengetahui prosedur GAP, biaya yang mahal serta prosedurnya yang rumit sehingga tidak dapat dilakukan oleh petani yang sosial ekonominya rendah, untuk itu CPOPC khususnya pemerintah seharusnya menyiapkan rencana

penanggulan untuk menjangkau para petani yang kesulitan dalam menerapkan GAP.



DAFTAR PUSTAKA

Coplin, William D. 1971. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*, English: Markham Pub.co.

CPOPC. 2018. *CPOPC Statement on the SDGs and RED II*:

<https://cpopc.org/2018/10/03/cpopc-statement-on-the-sdgs-andred-i/>,
diakses pada 15 NOVEMBER 2022

Hakim, Al-Kharitza Rahman. 2014. “ Kerjasama Bilateral Ekonomi Indonesia dan Malaysia dalam sektor Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010 “ *Jurnal Global & Policy*. Vol.9 : 9

Himawan, adhitya. 2016. Standar sawit CPOPC ditargetkan Rampung kuartal 1. <https://www.suara.com/bisnis/2016/02/02/011105/standar-sawit-cpop-ditargetkanrampung-kuartal-i-2016> diakses pada 28 Desember 2022

Kementrian Pertanian. 2017. ISPO Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/ispo-mewujudkan-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-2/>

Kurniawan, Roni. 2012. Pengaruh Penggunaan Sistem ERP, Ketersediaan Data dan Ketersediaan Laporan Terhadap Pengambilan keputusan pada Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal ComTech*. 03 (01). ISSN 2087:1244

Muchtadi, Tien R. Aziz, M Arfanul. 2016. *Industri Produk Hilir Kelapa Sawit*. CV Alfabeta. Bandung.

Mutuinstitute.com. 2022. Lima Masalah Pada Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan <https://mutuinstitute.com/post/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan/> diakses pada 05 Januari 2023

Official Website CPOPC <https://www.cpopc.org/>

Official BPDP sawit dalam <https://www.bpdp.or.id/>

Perwita dan Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sulistyo, Bambang DH, dkk. 2010. Budidaya Kelapa Sawit. Balai Pustaka. Jakarta. Hal 69-70.

Saputra W. 2020. Sengketa dagang minyak sawit RI-Uni Eropa. Dapat diakses pada: <https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawitri-uni-eropa>.

Tempo.com, 2016. Indonesia dan Malaysia Sepakati Dewan Sawit dalam

<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/05/090742467/indonesiadanmalaysia-isepakatistruktur-dewan-sawit> diakses pada 02 November 2022